FAKTOR-FAKTOR STRATEGIK PENCAPAIAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN) DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TAWANGMANGU KARANGANYAR

TESIS

Oleh :

SURIYANTO

NIM	**:**	**Q. 100050075**
Program Studi	**:**	**Magister Manajemen Pendidikan**
Konsentrasi	**:**	**Manajemen Sistem Pendidikan**

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2006

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 dinyatakan bahwa Negara bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mewujudkan tujuan tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran seperti tercantum pada Pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Secara operasional, implementasinya tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab III ayat 5, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Kewenangan Pusat dan Daerah, telah mendorong perubahan besar pada sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pendidikan termasuk salah satu sektor yang diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat sebatas menyusun acuan dan standar yang bersifat nasional. Walaupun pengelolaan pendidikan menjadi kewenangan kabupaten/kota, tetapi pengelolaan tersebut harus mengacu pada standar yang ditetapkan secara nasional dalam konteks desentralisasi pendidikan.

Implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah pemberian kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya (Sa’ud dan Makmun, 2005 : 37).

Terkait dengan itu pasal 35 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan agar kita memiliki Standar Nasional Pendidikan (SNP). Artinya, SNP sebagai acuan perkembangan dan pengendalian pendidikan, antara lain pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

Dalam kerangka itu, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (Dit. PLP) melakukan rintisan pengembangan Sekolah Standar Nasional (SSN). Dalam hal ini diharapkan dapat menjadi contoh wujud nyata dari sekolah yang dimaksudkan dalam SNP dan menjadi acuan atau rujukan sekolah lain dalam mengembangkan diri, sesuai dengan standar nasional. Sekolah lain sejenis diharapkan dapat bercermin untuk memperbaiki diri dalam menciptakan iklim psikp-sosial sekolah untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermakna, menyenangkan sekaligns mencerdaskan. Selain itu dengan adanya SSN, diharapkan sekolah sekolah lain yang berada pada daerah yang sama dapat terpacu untuk terus mengembangkan diri dan mencapai prestasi dalam berbagai bidang yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing sekolah, SSN diharapkan juga berfungsi sebagai patok duga *(bench mark)* bagi sekolah dalam mengembangkan diri menuju layanan pendidikan yang baik.

Setiap kabupaten/kota diharapkan minimal terdapat sebuah SSN, vang dikembangkan dari SMP yang telah ada di daerah yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan tahapan seleksi terhadap sekolah yang akan dijadikan sekolah standar nasional. Seleksi diperlukan guna menentukan sekolah mana yang sesuai dan layak untuk menjadi sekolah standar nasional di kabupaten/kota

tertentu, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pusat melalui pedoman seleksi.

Setelah terpilih satu atau dua sekolah sebagai SSN, sekolah yang bersangkutan harus mengembangkan diri sehingga benar-benar dapat menjadi model sekolah dengan standar nasional dan jajaran birokrasi di pusat/ propinsi/kabupaten/kota harus melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Selain itu perkembangan jaman juga berpengaruh terhadap pendidikan, sehingga mengakibatkan iklim pendidikan juga akan berubah. Kompleksitas masalah pendidikan menjadi semakin terasa, sehingga jika dipandang dari sudut kualitas harus disediakan gedung sekolah, biaya pendidikan dan tenaga guru dalam jumlah yang memadai. Sedangkan dari sudut kualitas yang saat ini menjadi banyak perhatian umum adalah masalah mutu pendidikan. Permasalahan pendidikan yang merupakan salah satu yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidik, khususnya pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, pengadaan buku-buku dan alat pengajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan dalam menunjukkan peningkatan, namun sebaliknya sekolah yang berada di daerah masih memprehatinkan.

Perlu diingat bahwa standar merupakan kriteria dinamik dan bukan statis. Dengan demikian SPM yang ditetapkan dalam pendidikan, maupun standar pendidikan yang ditetapkan pada SNP, tentunya juga merupakan

standar yang dinamik, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada situasi tertentu. Sekolah Standar Nasional (SSN) pada dasarnya merupakan sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SMP), yang berarti memenuhi tuntutan SPM sehingga diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang standar dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan. Dengan kata lain, SSN telah mampu memberikan layanan pendidikan kepada anak didik, sesuai dongan standar minimal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, SSN pada dasarnya dapat berfungsi sebagai sekolah model, artinya dapat dijadikan model bagaimana menyelenggarakan sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan secara nasional.

Dengan pengertian tersebut, mungkin saja dalam satu kabupaten/kota terdapat lebih dari satu SMP yang memenuhi kriteria sebagai SSN. Sebaliknya mungkin ada kabupaten/kota yang tidak memiliki sekolah yang memenuhi kriteria sebagai SSN. Pada hal, sebagai suatu langkah rintisan, diharapkan pada setiap kabupaten/kota diharapkan terdapat minimal satu SSN. Bertolak dari kemungkinan-kemungkinan di atas, pada tahap rintisan ini digunakan prinsip kedua, yaitu walaupun belum memenuhi standar yang ditetapkan SPM, sekolah dapat dikategorikan yaitu sebagai SSN jika sudah memenuhi sebagian besar tuntutan SPM dan dari perkembangan yang terjadi selama ini, diyakini akan segera mencapai standar yang ditentukan pada SPM. Dengan cara ini diharapkan pada setiap kabupaten/kota akan dapat dipilih minimal sebuah SSN.

Dalam pengertian kedua ini, SSN diartikan sebagai proses menjadi dan bukan kondisi yang ada saat ini. Dikaitkan dengan makna sekolah inti dalam

pengertian SSN yang kedua ini lebih berdimensi proses, artinya menjadi model bagaimana suatu sekolah berproses menjadi sekolah yang mencapai standar pelayan pendidikan yang ditentukan oleh SPM. Tentu saja kekurangan terhadap standar yang ditentukan oleh SPM tidak boleh terlalu banyak, sehingga diyakini dalam waktu pendek, kekurangan tersebut dapat dipenuhi dan sekolah benar-benar memenuhi SNP.

SMP Negeri 1 Tawangmangu sebagai sekolah yang berada pada level kota kecamatan dalam kenyataannya berhasil meraih status sebagai sekolah standar nasional. Kondisi tersebut tidak lepas dari kemampuan sekolah dalam memberikan layanan kepada anak didik mencakup aspek input, proses maupun output. Artinya layanan harus secara utuh mulai dari input yang seharusnya disediakan oleh sekolah, proses yang seharusnya terjadi di sekolah, dan output yang seharusnya dihasilkan oleh sekolah.

Sebagai suatu bentuk layanan kepada masyarakat mutu layanan pendidikan seringkali dikaitkan dengan tingkat kepuasan *stakeholder*. Sekolah dikatakan mampu memberikan layanan pendidikan yang baik (input, proses, dan output), jika sudah mampu memberikan layanan yang memuaskan *stakeholder sekolah,* yaitu siswa, orang tua siswa, pengguna lulusan, dan kelompok masyarakat lainnya. Namun kondisi tersebut belum terwujud yang berarti belum mampu memberikan layanan pendidikan yang memuaskan.

Menurut Mulyasa (2005 : 58) bahwa kondisi sekolah pada saat krisis sekarang ini sangat bervariasi dilihat dari segi kualitas, lokasi sekolah dan parsisipasi masyarakat (orang tua). Kualifikasi sekolah bervariasi dari sekolah yang sangat maju sampai sekolah yang sangat ketinggalanm sedangkan lokasi

sekolah bervariasi dari sekolah yang terletak di perkotaan sampai sekolah yang letaknya di daerah terpencil.

Sebagai sekolah yang termasuk daerah pinggiran, pencapaian prestasi belajar pada siswanya dalam Ujian Akhir Nasional cukup membanggakan. Tahun pelajaran 2002/2003 rata-rata nilai pada 6 mata pelajaran yang di UAN kan adalah 7,02, tahun 2003/2004 mencapai rata-rata 6,50 untuk 3 mapel yang di UAN kan sedangkan pada tahun 2004/2005 mencapai rata-rata 7,84. Atas konsistensi prestasi yang dicapai tersebut, SMP Negeri 1 Tawangmangu mendapat status sebagai sekolah SSN. Hasil nilai tersebut untuk sekolah seperti SMP Negeri 1 Tawangmangu masuk kategori sangat bagus mengingat input siswa yang hanya berasal dari wilayah Tawangmangu ditambah dari wilayah Jatiyoso yang merupakan daerah terpencil.

Atas pencapaian yang telah diperoleh SMP Negeri 1 Tawangmangu tersebut di atas maka dapat diasumsikan bahwa sebagai sekolah SSN, SMP Negeri 1 Tawangmangu mampu memanajemen input, proses sehingga menghasilkan output yang seharusnya dihasilkan oleh sekolah.

B. Identifikasi Masalah

Manajemen sekolah hakikatnya merupakan usaha/tindakan untuk melaksanakan gugusan kegiatan administrasi sekolah, agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, manajemen sekolah tidak dapat dipisahkan dengan administrasi sekolah. Dalam buku petunjuk administrasi pendidikan di sekolah disebutkan bahwa sekolah standar nasional sebagai suatu sistem pendidikan, standar layanan

pendidikan tentunya mengacu pada aspek input, proses dan output (Depdikbud, 2004).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, pembatasan masalah penelitian difokuskan pada persoalan yang diasumsikan terkait langsung dengan peningkatan mutu belajar pada mapel yang di UAN kan. Oleh karena itu rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah komponen *input* dalam rangka pencapaian Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri 1 Tawangmangu?
2. Bagaimanakah komponen proses dalam rangka pencapaian Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri 1 Tawangmangu ?
3. Bagaimanakah komponen *ouput* dalam rangka pencapaian Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri 1 Tawangmangu ?
4. Bagaimanakah *outcome* dalam pencapaian Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri 1 Tawangmangu ?
5. Bagaimana aspek pengembangan SSN Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri 1 Tawangmangu ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komponen *input* dalam rangka pencapaian Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri 1 Tawangmangu.

2. Untuk mengetahui komponen proses dalam rangka pencapaian Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri 1 Tawangmangu.
3. Untuk mengetahui komponen *output* dalam rangka pencapaian Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri 1 Tawangmangu.
4. Untuk mengetahui *outcome* dalam pencapaian Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri 1 Tawangmangu.
5. Untuk mengetahui aspek pengembangan Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri 1 Tawangmangu.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan memiliki sumbangan teoritis dalam khasanah pengetahuan tentang faktor-faktor strategik dalam pencapaian sekolah standar nasional.

2. Manfaat Praktis
   a. Sebagai masukan informasi bagi praktisi pendidikan (guru dan kepala sekolah) mengenai pentingnya input, proses dan ouput dalam pencapaian sekolah standar nasional.
   b. Bagi *stakeholders* pendidikan, sebagai bahan kaji untuk rujukan pengambilan keputusan, terutama yang terkait langsung dengan persoalan kegiatan belajar mengajar di sekolah guna pencapaian sekolah standar nasional.